

LPPD 2020

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN



TAHUN ANGGARAN 2020

Dinas koperasi , usaha kecil menengah dan perdagangan Kabupaten Pasangkayu dalam tugas dan fungsinya menyelenggarakan satu urusan wajib (koperasi usaha kecil menengah), dan satu urusan pilihan.(perdagangan).Laporan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dinas koperasu uraha kecil menengah kapabupate Pasangkayu tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

A. *Kondisi Umum*

Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Peranan strategis tersebut diantaranya adalah meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Keberadaan Koperasi dan UKM yang terdapat hampir diseluruh wilayah dan bergerak hampir diseluruh wilayah dan bergerak hampir pada semua jenis usaha, serta keunggulannya dalam bertahan menghadapi guncangan krisis ekonomi mampu memberikan dukungan yang besar kepada pengusaha menengah dan pengusaha besar. Oleh karena itu, Koperasi dan UKM memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Semangat kekeluargaan yang ada didalam koperasi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dapat terwujud.

Koperasi yang berazaskan kekeluargaan merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat karena langsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan pembangunan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia memang masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan untuk mendirikan koperasi sebagai wadah dalam memperlancar perekonomian rakyat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, secara berkesinambungan melakukan pembinaan baik itu berupa keterampilan usaha, manajemen, pemasaran maupun permodalan. Hal tersebut dimaksudkan agar Koperasi dan UKM dapat maju, berkembang dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam rangka memberdayakan Koperasi dan UKM agar lebih produktif. Disinilah peran

pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dituntut untuk lebih bisa memaksimalkan eksistensi sektor Koperasi dan UKM dengan harapan nantinya mereka yang ada di wilayah Kabupaten Pasangkayu mampu mendukung kemandirian dan daya saing daerah serta terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat

B. Kebijakan Program

Kebijakan pada urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui :

1. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Fasilitasi akses permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
4. Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program penunjang kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 beserta tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, laporan kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

Program-program urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan dan sikap kewirausahaan dapat semakin berkembang, produktivitas meningkat, jumlah wirausaha baru terus bertambah. Realisasi pelaksanaan ini untuk memfasilitasi Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran dan meningkatnya SDM bagi pelaku Koperasi dan UKM.
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengurus koperasi

C. Hasil yang dicapai

Hasil pembangunan di bidang Koperasi dan UKM tahun 2020 adalah sebagai berikut :

JUMLAH KOPERASI PER 31 DESEMBER 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		
		KOPERASI	KOPERASI AKTIF	KOPERASI TIDAK AKTIF
1	2	3	4	5
1	SARUDU	5	3	2
2	DAPURANG	2	0	2
3	DURIPOKU	4	1	3
4	BARAS	11	3	8
5	LARIANG	6	1	5
6	BULUTABA	5	2	3
7	PASANGKAYU	34	15	19
8	PEDONGGA	5	4	1
9	TIKKE RAYA	5	3	2
10	BAMBALAMOTU	12	3	9
11	BAMBAIRA	0	0	0
12	SARJO	5	3	2
JUMLAH		94	38	56

Jadi jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Pasangkayu per 31 desember 2020 adalah 94 koperasi dengan koperasi yang aktif sebanyak 38 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 56 koperasi. Sedangkan data mengenai Usaha Kecil Menengah dapat dijelaskan melalui data berikut ini :

JUMLAH USAHA KECIL MENENGAH PER 31 DESEMBER 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
		(< 50 JUTA)	(50 JUTA - < 500 JUTA)	(500 JUTA - < 10 MILYAR)	
1	SARJO	40	12	2	54
2	BAMBAIRA	39	17	1	57
3	BAMBALAMOTU	60	21	1	82
4	PASANGKAYU	304	97	5	406
5	PEDONGGA	95	14	1	110
6	TIKKE	184	52	7	243
7	LARIANG	90	26	2	118
8	BARAS	163	65	4	232
9	BULUTABA	114	32	1	147
10	SARUDU	134	33	3	170
11	DAPURANG	123	29	4	156
12	DURIPOKU	43	15		68
TOTAL		1.389	413	31	1.833

D. SKPD Penyelenggara urusan

Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasngakayu

E. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebanyak 18 (sembilan belas) orang

F. Alokasi dan realisasi anggaran

Program dan kegiatan dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2020 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebesar Rp.485.648.843,- dengan realisasi Rp.460.350.500,- Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara lebih terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Anggaran program penunjang urusan wajib koperasi dan UKM serta urusan pilihan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.285.000	10.285.000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.880.000	44.780.000	97,62
3	Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Negara	9.067.500	9.067.500	100
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	4.750.000	1.891.700	39,82
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	57.546.000	57.546.000	100
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.610.000	18.610.000	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.236.950	10.236.950	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.864.250	13.769.250	43,21
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraruran perundang-undangan	8.280.000	8.280.000	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	89.240.018	89.174.800	99,92
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50.000.000	49.993.900	99,98
12	Penyediaan Jasa Kantor	15.182.500	15.182.500	100
	JUMLAH (Rp)	485.648.843	460.350.500	98,98

3. Program peningkatan sarana aparatur
Kegiatannya meliputi :

NO	4. O KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25.140.000	24.936.000	99,14
2	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	20.000.000	19.995.000	99,97
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	6.500.000	6.500.000	100
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.300.000	2.300.000	100
	JUMLAH (Rp)	53.940.000	53.731.000	99,61

3. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.928.750	2.928.750	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1,464.475	1,464.475	100
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,464.475	1,464.475	100
4	Penyusunan RKA, RKPA, DPA, dan DPPA SKPD	5.000.000	5.000.000	100
	JUMLAH (Rp)	10.875.500	10.875.500	100

- Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)
1	Evaluasi dan monitoring hibah peralatan produksi UKM	9.055.000	9.046.100	99,90
JUMLAH (Rp)		9.055.000	9.046.100	99,90

2. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)
1	Pembinaan , pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	57.916.625	57.898.300	99,96
JUMLAH (Rp)		57.916.625	57.898.300	99,96

G. Proses Perencanaan dan pembangunan

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mamuju Utara dilalui melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa, kemudian pada tingkat kelurahan dan kecamatan yang kemudian hasilnya ditindaklanjuti dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil forum tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

H. Sarana dan prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di bidang koperasi dan usaha kecil menengah cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, walaupun masih ada beberapa sarana yang perlu dilengkapi

I. Permasalahan

1. Koperasi dan UKM sangat terdampak dengan adanya pandemic covid-19
2. Belum semua pengelola Koperasi Simpan Pinjam memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian

3. Kurangnya kesadaran pengelola Koperasi dan UKM terhadap tertib administrasi dalam hal penyampaian laporan perkembangan usahanya secara berkala, sehingga menyulitkan dalam updating data
4. Pengurus Koperasi dan UKM kurang memiliki daya saing, sehingga perkembangan usaha berjalan lambat karena kurangnya pengembangan pangsa pasar yang lebih luas

J. Tindak Lanjut

1. Melakukan pembinaan koperasi dan UKM dengan protocol kesehatan
2. Meningkatkan frekuensi pembinaan dan pengawasan Koperasi dan UKM, secara sistematis dan terarah berbasis pengetahuan, teknologi serta inovasi
3. Melakukan bimbingan kepada pelaku koperasi dan UKM untuk berinovasi di tengah wabah pandemic covid-19
4. Melakukan penyaluran bantuan modal usaha bagi koperasi dan UKM yang terdampak covid-19

2. URUSAN PERDAGANGAN

1. Kondisi umum

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan suatu daerah adalah tingkat volume perdagangan serta arus barang dan jasa, Pertumbuhan aktifitas perdagangan dapat dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas. Dari aspek kuantitas adalah bertumbuhnya jumlah usaha perdagangan yang ada di suatu wilayah, sedangkan dari aspek kualitas adalah meningkatnya infrastruktur dan sarana perdagangan serta meningkatnya perlindungan konsumen.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan di sektor perdagangan merupakan salah satu pilar yang diarahkan untuk bersinergi dengan sektor lainnya untuk mewujudkan pembangunan perdagangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sejak undang undang otonomi daerah dilaksanakan, hampir semua pemerintah daerah berlomba untuk berinovasi termasuk di sektor perdagangan. Hal ini ditujukan untuk menghadapi persaingan antar daerah, regional, bahkan global. Peningkatan sarana perdagangan merupakan pilihan yang tak dapat ditawar agar didistribusi barang dan jasa ke semua wilayah dapat berlangsung dengan baik sehingga menciptakan stabilisasi harga di semua wilayah.

Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melalui bidang perdagangan menata dan menertibkan sejumlah 30 pasar dan membina 9 pedagang besar, 12 pedagang menengah, dan 161 pedagang kecil / informal.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan di wilayahnya. Khusus untuk tahun 2020 dituangkan dalam beberapa program sebagai berikut.

6.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pada urusan perdagangan diarahkan pada perlindungan konsumen dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, program ini diarahkan untuk memberikan jaminan keamanan produk dan informasi harga bahan pokok ke masyarakat..
2. Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, program ini diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana perdagangan.

6.3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
Tujuan program ini adalah memberikan perlindungan dan keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa, serta kepastian informasi harga kebutuhan pokok. Kegiatan yang telah dilakukan adalah :

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Pada kegiatan ini telah dilakukan di 12 kecamatan selama 1 tahun
2. Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, tujuannya adalah untuk meningkatkan sarana pasar. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
 - a. Pembangunan pasar, kegiatan ini merupakan retensi dari kegiatan tahun 2017 yaitu perencanaan dan pengawasan pembangunan rabat beton pasar pasangkayu yang belum dibayarkan .
 - b. Pemeliharaan pasar, kegiatan ini merupakan retensi dari kegiatan tahun 2019 yaitu pemeliharaan pasar Pedongga
 - c. Pembangunan sarana penunjang pasar, kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi yaitu pasar Martajaya dan pasar Tikke dan pasar Lilimori

6.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan perdagangan adalah sebanyak 12 orang

6.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan pada tahun 2020 sebesar Rp.586.594.350,- dengan realisasi Rp.409,493.813,- yang diuraikan sebagai berikut :

a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	193.563.500	193.548.300	99,99
JUMLAH		193.563.500	193.548.300	99,99

b. Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pembangunan pasar :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Pembangunan pasar	2.500.000	-	0
2	Pemeliharaan pasar	4.736.550	4.736.550	100,
3	Pembangunan sarana pendukung pasar	385.792.300	252.432.700	54,74
JUMLAH		393.028.850	215.945.513	54.94

6.7 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan di sektor perdagangan dilaksanakan sesuai dengan undang undang nomor 24 tahun 2004 yaitu melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai di tingkat kabupaten yang dituangkan dalam RKPD, hasil musrenbang dalam RKPD selanjutnya dijabarkan ke dalam Renja, dan RKA SKPD dan ditetapkan dalam DPA SKPD

6.8. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di bidang perdagangan cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, walaupun masih ada beberapa saran yang perlu dilengkapi.

7.9.PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pandemi covid-19 yang menghambat pelaksanaan beberapa kegiatan dan bahkan ada yang anggarannya direlokasi
2. Belum adanya aparat fungsional di bidang perdagangan khususnya pengawas tera dan penera.
3. Kualitas infrastruktur perdagangan masih rendah
4. Masih banyak usaha perdagangan yang belum memiliki SIUP.
5. Belum maksimalnya pengendalian kelangkaan BBM dan gas elpiji subsidi.

7.10. TINDAK LANJUT

Rekomendasi tindak lanjut kendala yang di hadapi bidang perdagangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dengan penerapan protocol kesehatan
2. Meningkatkan kordinasi dengan kementerian perdagangan dan pemerintah daerah terkait dengan pengusulan aparat fungsional pengawas tera dan penera
3. Mengoptimalkan pengalokasian anggaran pada peningkatan infrastruktur pasar. .
4. Pemberian kemudahan pengurusan SIUP.
5. Meningkatkan koordinasi terhadap pihak terkat sehubungan dengan seringnya terjadi kelangkaan BBM dan gas elpiji subsidi.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2020**

KABUPATEN : Mamuju Utara
NAMA SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - Perdagangan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja per urusan		Keterangan
						Urusan Koperasi & UKM	Urusan Perdagangan	Koperasi & UKM	Perdagangan	
1	2	3	4	5	6	7 (a)	7 (b)	8 (a)	8 (b)	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kemetreian /LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program nasional x 100 %	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 4 program - Jumlah Program Nasional (RKP), yang Dilaksanakan SKPD sebanyak 2 program	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 5 program - Jumlah Program Nasional (RKP), yang Dilaksanakan SKPD sebanyak 1 program	50%	20%	Jumlah program yang dilaksanakan OPD sebanyak 5 program, 1 program yang dilaksanakan oleh OPD bukan program nasional
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen/LPND	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Belum ada SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDNGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (Permen tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut permen tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - Perda yang seharusnya sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - Perda yang seharusnya sebanyak 1	0%	100%	Perda Retribusi Pasar yang dilak- sanakan oleh bidang perda- gangan. Perbup ttg izin UKM belum ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan esaloner yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 2 - Jabatan yang ada sebanyak 4	62%	50%	5 Jabatan esalon IVa masih lowong
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Penyuluh koperasi penyuluh UKM	Penera Pengawas tera	Tidak ada	Tidak ada	Jabatan masih lowong
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Koperasi dan UKM sebanyak 21 personil - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.910 personil	- PNS yang menangani urusan Perdagangan sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.910 personil	0,61 %	0,40 %	

			7	Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang	60%	50%	Dua Pejabat eselon IVa yang belum Latpim dan satu pejabat eselon III b yang belum Latpim
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat kepengkatan sebanyak 4 orang - Jabatan yang ada sebanyak 8 jabatan	- Pejabat yang memenuhi syarat kepengkatan sebanyak 2 orang - Jabatan yang ada sebanyak 4 jabatan	62%	50%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-DPA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	ada sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-DPA SKPD	ada sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-DPA SKPD	Ada	Ada	Lengkap
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi Jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD, sebanyak 7 program. - Program RENJA SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7	- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD, sebanyak 2 program. - Program RENJA SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 2	100%	100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD	11	Jumlah program RENJA yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi Jumlah program dalam RKA SKPD x 100 %	- Program RENJA RKPD diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 7 program	- Program RENJA RKPD diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 2 program	100%	100%	
		Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	12	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 5 program	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 2 program	71,42%	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100 %	- Total alokasi belanja SKPD sebesar Rp.2.835.793.280,- - Total belanja APBD sebesar Rp.....	- Total alokasi belanja SKPD sebesar Rp.586.592.350,- - Total belanja APBD sebesar Rp.....			
		Besaran Belanja Modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Belanja modal SKPD sebesar Rp.39.126.000,- - Total belanja SKPD sebesar Rp.2.816.336.752,-	- Belanja modal SKPD sebesar Rp.211.208.963,- - Total belanja SKPD sebesar Rp.409.393.813,-	1,38%	51,59%	

	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja barang dan jasa SKPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp.28.795.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp.460.450.500,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp.4.736.550,- - Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp.197.384.850,-	6,25%	2,39%	
		16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp.28.795.000,- - Total belanja SKPD sebesar Rp..2.816.336.752,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp.4.736.550,- - Total belanja SKPD sebesar Rp.409.393.813,-	1,02%	1,15%	
	Laporan Keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada sebanyak 6 jenis, sbb : 1. Buku Besar Belanja 2018 2. Bk Bsr Gaji dan Tunjangan 3. Buku Besar Honorarium 4. Calk Koperindag 5. Jurnal Pengeluaran 6. Laporan Realisasi 2020	Ada sebanyak 6 jenis, sbb : 1. Buku Besar Belanja 2018 2. Bk Bsr Gaji dan Tunjangan 3. Buku Besar Honorarium 4. Calk Koperindag 5. Jurnal Pengeluaran 6. Laporan Realisasi 2020	Ada, sebanyak 6 jenis	Ada, sebanyak 6 jenis	Lengkap
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK NEGARA	18	keberadaan inventaris barang atau asset SKPD	Ada	apabila Ada,sebutkan jenis dokumennya 1.Rekapitulasi Buku Inventaris 2.Buku Inventaris 3.Realisasi 4.Mutasi 5.Daftar Penetapan Status 6.KIB (A,B,C,D,E,F) 7.KIR	apabila ada,sebutkan jenis dokumennya 1.Rekapitulasi Buku Inventaris 2.Buku Inventaris 3.Realisasi 4.Mutasi 5.Daftar Penetapan Status 6.KIB (A,B,C,D,E,F) 7.KIR	Ada 7 Jenis	ada 7 Jenis	Lengkap
	penggunaan asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 1 Unit, asset. (asset.Rp.6.315.964,-) - Asset yang dikuasai SKPD sebanyak 71 Unit, asset (Rp.1.221.379.410,-)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak,3 Unit, asset. (Rp.18.354.264,-) - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 130 Unit, asset. (Rp.56.915.365.890,-)	0,5%	0,03%	
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PERTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas /prasarana informasi : 1. papan pengumuman 2. pos pengaduan 3. leaflet 4. mobil keliling 5. pengumuman di mass media	Jumlah /fasilitas prasarana parsitipasi	Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	Ada	Ada	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

**DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK KABUPATEN/KOTA
PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM**

No	IKK	Elemen Data	Satuan elemen data	Elemen Data Dalam LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	4	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	DKUKM-DAG
		Jumlah program nasional (RKP)	program	9	Given	
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah SOP	Dokumen	0		
		SOP #1	Jenis SOP		FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditatatangannya SOP tsb	
		SOP #2	Jenis SOP			
		SOP #3	Jenis SOP			
		SOP #4	Jenis SOP			
		SOP #5	Jenis SOP			
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	Photocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditatatangannya perda pelaksanaan dari permen tsb	
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	2	Daftar rincian yang menunjukan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani	
4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi	DKUKM-DAG
		Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	16	FC Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD	
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada		Daftar rincian yang menunjukan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait	
		1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional			
		2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional			
		3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional			
		4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fusngsional			
6	Rasio PNS Kab/Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	33	Daftar rincian yang menunjukan jumlah pns SKPD pada bidang terkait	DKUKM-DAG
		Jumlah PNS Kab/Kota	orang	3.910	Daftar rincian yang menunjukan jumlah PNS Kab/Kota	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang sudah ikut Diklatpim	orang	7	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim	DKUKM-DAG
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10	Daftar jumlah pejabat SKPD	DKUKM-DAG
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	DKUKM-DAG
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10	Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	DKUKM-DAG
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	5		DKUKM-DAG
	-RENSTRA-SKPD	-RENSTRA-SKPD	dokumen	ada	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditatatangannya Renstra tsb	DKUKM-DAG
	-RENJA-SKPD	-RENJA-SKPD	dokumen	ada	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditatatangannya Renja tsb	DKUKM-DAG
	-RKA-SKPD	-RKA-SKPD	dokumen	ada	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditatatangannya RKA tsb	DKUKM-DAG
10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	9	FC halaman muka (cover), halam yang menunjukan program dari skpd pada urusan terkait	DKUKM-DAG
		Jumlah program RENJA SKPD	program	9	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait	DKUKM-DAG

No	IKK	Elemen Data	Satuan elemen data	Elemen Data Dalam LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	9	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA	DKUKM-DAG
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	9	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA	DKUKM-DAG
12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	6	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA	DKUKM-DAG
		Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA	DKUKM-DAG
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran SKPD	Rp	3.422.835.630	FC Laporan Keuangan SKPD	DKUKM-DAG
		Total anggaran belanja APBD	Rp			
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi Belanja Modal SKPD	Rp	250.334.963		DKUKM-DAG
		Realisasi Belanja SKPD	Rp	3.225.730.565		DKUKM-DAG
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	33.531.550		DKUKM-DAG
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	657,835,350		DKUKM-DAG
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	33.531.550		DKUKM-DAG
		Realisasi Belanja SKPD	Rp	3.225.730.565	DKUKM-DAG	
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3		DKUKM-DAG
	- Neraca	- Neraca	Dokumen	ada	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb	DKUKM-DAG
	- LRA	- LRA	Dokumen	ada	FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA	DKUKM-DAG
	- CALK	- CALK	Dokumen	ada	FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK	DKUKM-DAG
18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	Dokumen	ada	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi	DKUKM-DAG
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	648.785.939	Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan	DKUKM-DAG
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	16,109,369,968	Daftar rincian yang menunjukan total aset yang dikuasai SKPD	DKUKM-DAG
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah			
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak ada	Print out foto	
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	Tidak ada	FC Leaflet	
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak ada	Daftar Inventaris	
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak ada	Print out foto	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak ada	FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait	



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan Abdul Muis No. Pasangkayu 91571

**DAFTAR JUMLAH USAHA MIKRO
YANG MENJADI WIRAUSAHA
SAMPAI TAHUN 2020**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA
1	Sumarni	Desa SarjoKec. Sarjo	Anyaman lidi
2	Elmu'as	Desa KumasarKec. Sarudu	Anyaman pakiskawat
3	Husnah	Desa DapurangKec. Dapurang	Kripik turtal jagung
4	Aswar	PasangkayuKec. Pasangkayu	Kerajinan dari limbah kayu
5	Bunny arianti	PedonggaKec. Pasangkayu	Kue tradisional
6	Sinar	Desa BambairaKec. Bambaira	Kaitenun sutra pasangkayu
7	Ramlah	Dusun KasoloangKec. Bambaira	Kripik pisang tanduk
8	Artati	Desa BambalamotuKec. Bambalamotu	Gula aren
9	Aminatussa'diah	Tirta BuanaKec. Dapurang	Kerajinan pita dan bros
10	Surianti	Desa LetawaKec. Sarjo	Abon ikan
11	Nurhayati	Desa AkoKec. Pasangkayu	Gula Aren
12	Herman	Desa TumpaureKec. Bambaira	Kopi Salak
13	Nurhaedah	Desa TaranggiKec. Duripoku	Susu Jahe
14	Hj. Nuraeni	Desa TammarunangKec. Duripoku	Pot bungadari handuk
15	Herianti	Desa KaraveKec. Bulutaba	Anyaman Tas dari Tali Kur
16	Karmiati	Batu MatoruKec. Lariang	Konveksi
17	Ishak	Desa ParabuKec. Lariang	Jamur Tiram
18	Saddam	Bambalokakec. Baras	Bonsai Kelapa
19	Husnulanshori	Desa Saptana Jaya Kec. Duripoku	Ukir dari kayu
20	Muh. Alif	Karya BersamaKec. Pasangkayu	Catering alief
21	LinceL	Desa PedandaKec. Pedongga	Kaitenun
22	Hardang	Desa Pakavakec. Pasangkayu	Abon jamur
23	Kasmawati	Desa Bukit HarapanKec. Bulutaba	Abon Telur
24	Hj. Siti Mariyatul Qiptiyah	Desa BajawaliKec. Lariang	Jamukering dan Kristal jahe
25	Dewi Sri Rara Sati	Desa RandomayangKec. Bambalamotu	Kerajinan Bros dan kapaldalambotol
26	Rahmatia	Desa KasoloangKec. Bambaira	Aneka Kue
27	Ahmadi	PasangkayuKec. Pasangkayu	Minyak kelapa dalam
28	Asmah	Desa LilimoriKec. Bulutaba	Kerajinan talikur
29	Syarifah	Desa PolewaliKec. Bambalamotu	Dodol ubi dan tapioka
30	Hamidah	Desa Kaluku NangkaKec. Bambaira	Dodol Kelapa Muda



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan Abdul Muis No. Pasangkayu 91571

**DAFTAR USAHA KECIL
DI KABUPATEN PASANGKAYU
SAMPAI TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sarudu	54	Aktif
2	Dapurang	26	Aktif
3	Baras	41	Aktif
4	Tikke	37	Aktif
5	Lariang	3	Aktif
6	Pedongga	48	Aktif
7	Bulutaba	32	Aktif
8	Duripoku	2	Aktif
9	Pasangkayu	236	Aktif
10	Bambalamotu	24	Aktif
11	Bambaira	67	Aktif
12	Sarjo	15	Aktif
	Total	585	



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan Abdul Muis No. Pasangkayu 91571

DAFTAR USAHA KECIL YANG DIBERI DUKUNGAN
FASILITAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PRODUK USAHA
SAMPAI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sarudu	10	Aktif
2	Dapurang	5	Aktif
3	Baras	13	Aktif
4	Tikke	8	Aktif
5	Lariang	8	Aktif
6	Pedongga	2	Aktif
7	Bulutaba	10	Aktif
8	Duripoku	4	Aktif
9	Pasangkayu	35	Aktif
10	Bambalamotu	13	Aktif
11	Bambaira	18	Aktif
12	Sarjo	9	Aktif
	total	135	



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan Abdul Muis No. Pasangkayu 91571

**DAFTAR NAMA USAHA MIKRO
DI KABUPATEN PASANGKAYU
SAMPAI TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sarudu	157	Aktif
2	Dapurang	93	Aktif
3	Baras	51	Aktif
4	Tikke	48	Aktif
5	Lariang	42	Aktif
6	Pedongga	39	Aktif
7	Bulutaba	42	Aktif
8	Duripoku	100	Aktif
9	Pasangkayu	505	Aktif
10	Bambalamotu	261	Aktif
11	Bambaira	52	Aktif
12	Sarjo	49	Aktif
	Total	1.439	

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	109	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{9}{94} \times 100$	9,57 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		110	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{30}{1.439} \times 100$	2,08 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		111	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{135}{585} \times 100$	23,07%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		112	Koperasi Aktif	$\frac{38}{94} \times 100$	40,42 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Perdagangan	139	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	$\frac{505,48 \text{ Milyar rupiah}}{10.215,69 \text{ Milyar rupiah}} \times 100$	4,93 %	Sumber data dari BPS atau dari buku PDRB Sektor Perdagangan (harga berlaku berdasar jenis lapangan usaha)
		140	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{534}{2.819} \times 100$	18,94 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perdagangan
		141	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{14.070,00 \text{ ton}}{50,706,05 \text{ ton}} \times 100$	27,74 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perdagangan

Pasangkayu, 20 Januari 2020

